

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia terjadi antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada dibawah kepemimpinan pemerintahan orde baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis, baik di desa maupun di kota karena pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang tinggal di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja. Namun, ketika pada tahun 1990-an krisis finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan melejit tinggi, dan dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika. [1]

Karena kemiskinan, banyak sekali dampak buruk yang terjadi di Indonesia. Diantaranya yaitu: **(1) Pengangguran.** Pengangguran berarti tidak bekerja, dan tidak bekerja berarti tidak mendapatkan atau tidak mempunyai penghasilan. Sedangkan manusia hidup di bumi ini pasti butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jumlah pengangguran di Indonesia yang terjadi pada awal tahun 2011 mencapai 8,12 juta orang. Jumlah pengangguran tersebut cukup fantastis sehingga tidak mudah bagi pemerintah untuk menangani masalah tersebut. **(2) Kekerasan.** Kekerasan yang terjadi di Indonesia biasanya disebabkan karena dampak pengangguran. Karena mereka tidak mampu untuk mencari nafkah, membuat mereka kehilangan akal sehatnya ditengah keputus asaannya. Sehingga menyebabkan mereka berbuat kekerasan. Salah satu contoh dari

kekerasan ini adalah Pembegalan yang marak terjadi pada akhir-akhir ini. **(3) Pendidikan.** Biaya pendidikan yang mahal, mengakibatkan masyarakat Indonesia yang miskin tidak dapat merasakan dunia pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk pengetahuan, terutama dalam bekerja pasti butuh pengetahuan, apalagi pada lapangan kerja suatu perusahaan pasti mensyaratkan pendidikan yang tinggi. Pada akhirnya, mereka yang tidak merasakan dunia pendidikan berada dalam kondisi yang buruk. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Hal ini berdampak pada pengangguran yang lebih banyak. Sedangkan di era globalisasi ini menuntut kita untuk bersaing untuk bisa terampil dalam segala bidang. **(4) Kesehatan.** Biaya pengobatan tidaklah murah, apalagi di era yang serba modern ini Alat-alat klinik yang canggih membuat bertambah mahal biaya pengobatan. Biaya pengobatan yang mahal tidak hanya terjadi pada rumah sakit pemerintah, bahkan pada rumah sakit swasta akan lebih mahal dan biaya pengobatan tersebut tidak terjangkau oleh kalangan keluarga atau masyarakat yang miskin. **(5) Konflik social bernuansa SARA.** Konflik SARA terjadi karena hilangnya akal sehat seseorang karena kondisi kemiskinan dan pengangguran yang semakin hari semakin banyak. Hal ini adalah sebuah bukti lain dari dampak kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, pemerintah mengusahakan berbagai cara dengan membuat beberapa program. Program tersebut diantaranya berupa bantuan, bantuan tersebut dapat berupa uang tunai ataupun suatu kebutuhan pokok yang nantinya diberikan kepada masyarakat miskin.

Pada tahun 2007 pemerintah melaksanakan program keluarga harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers (CCT)* atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut

dapat berupa fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil). Sebenarnya, PKH telah terlaksana di berbagai negara, diantaranya di negara-negara Amerika Latin PKH sudah terlaksana sejak lama dengan nama program yang bermacam-macam. Namun, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT) diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini “bukan” dimaksudkan sebagai program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli kebutuhannya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan untuk mengupayakan membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.[2]

Dalam menentukan penerima bantuan PKH di kab.PATI, tepatnya di kecamatan Margorejo masih menggunakan cara yang manual. Dengan jumlah data calon penerima yang banyak, cara manual tersebut tidaklah efektif. Oleh karena itu dengan kriteria-kriteria yang ditentukan tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan penerima yang benar-benar berhak menerima bantuan PKH. Untuk mempermudah dalam menentukan penerima bantuan PKH, diperlukan adanya system yang dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan penerima bantuan PKH.

Decision Support Sistem (DSS) atau dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Pendukung Keputusan yang diciptakan oleh G.Antony Gorry dan Michael S. Scott Morton, merupakan bagian dari system informasi yang biasa digunakan oleh pengambil keputusan dalam membantu mengambil keputusan.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja pembuatan suatu aplikasi computer. System tersebut merupakan suatu system berbasis computer atau perangkat lunak yang bertujuan untuk membantu memudahkan pengambil keputusan dalam mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu. [3]

Pada dasarnya Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu tahap-tahap pengambilan keputusan mulai dari mengidentifikasi masalah,

memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternative. Beberapa metode yang sering digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan diantaranya yaitu : Metode Simple Additive Weighting (SAW), Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), Metode Promethee, Bayesian Decision Theory. Dan selain itu, masih banyak lagi metode-metode yang ada dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model system pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah *multi factor* atau *multi criteria* menjadi suatu bentuk hirarki. *Analytical Hierarchy Process* cukup efektif dalam menyederhanakan dan mempercepat proses serta kualitas hasil pengambilan keputusan yang merupakan satu model yang fleksibel yang memungkinkan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok untuk membentuk gagasan-gagasan dan membatasi masalah dengan membuat pendapat mereka sendiri dan menghasilkan pemecahan yang diinginkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dita Monita pada tahun 2013 dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai dengan menggunakan Metode AHP”. Metode AHP dipilih untuk menyelesaikan system pendukung keputusan agar hasil yang didapat lebih akurat dan system yang dirancang tersusun secara sistematis ia memutuskan untuk menggunakan metode AHP. Metode AHP dipilih karena metode ini merupakan model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multi factor atau multi criteria menjadi bentuk hierarki. AHP cukup efektif dalam mempercepat proses dan hasil kualitas pengambilan keputusan merupakan model yang fleksibel.[4]

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Terta Ganda pada tahun 2014 dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Tahunan dari Perusahaan dengan Metode AHP”. Dalam penelitiannya metode AHP dipilih dalam perancangan system pendukung

keputusan karena dibanding dengan yang lainnya, AHP memiliki kelebihan adanya struktur yang hirarki sebagai konsekuensi dari criteria yang dipilih, sampai pada sub-sub criteria yang mendetail.[5]

Karena AHP bersifat multi criteria, AHP sering digunakan dalam penyusunan prioritas. AHP juga sering dipakai oleh lembaga untuk melakukan penelitian. Pada dasarnya, dalam proses pengambilan keputusan menggunakan metode AHP adalah memilih suatu alternative yang prosesnya membentuk skor secara numeric dalam menyusun rangking setiap alternative pembuatan keputusan berdasarkan bagaimana cara alternative tersebut cocok sesuai dengan criteria pembuatan keputusan. [6].

Maka dari itu, akan dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk mengatasi masalah yang ada di kecamatan Margorejo. Agar nantinya dapat memudahkan pemerintah kecamatan Margorejo dalam pengambilan keputusan penerima bantuan PKH yang benar-benar sesuai dengan criteria yang telah ditentukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditemukan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang system pendukung keputusan untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah hanya pada penggunaan metode *analytical hierarchy process* (AHP) untuk menentukan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* untuk menentukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan.”

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan tentang penggunaan metode dalam sistem pengambilan keputusan dan memberi inspirasi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang metode dan algoritma penyelesaian masalah kompleks.

2. Bagi pemerintah kecamatan Margorejo

Dengan adanya sistem pendukung keputusan dapat membantu pemerintah dalam menentukan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

3. Bagi Pembaca

Mendapat pengetahuan tentang metode *Analytical Hierarchy Process* yang merupakan suatu model system pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan yang menguraikan masalah *multi factor* atau *multi criteria* menjadi suatu bentuk hirarki.

4. Bagi Akademik

Sebagai ukuran sejauh mana pemahaman dan penguasaan materi terhadap teori yang diajarkan. Sebagai bahan referensi bagi mereka yang mengadakan penelitian untuk dikembangkan lebih lanjut dengan permasalahan yang berbeda. Dan sebagai bahan evaluasi akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan.